

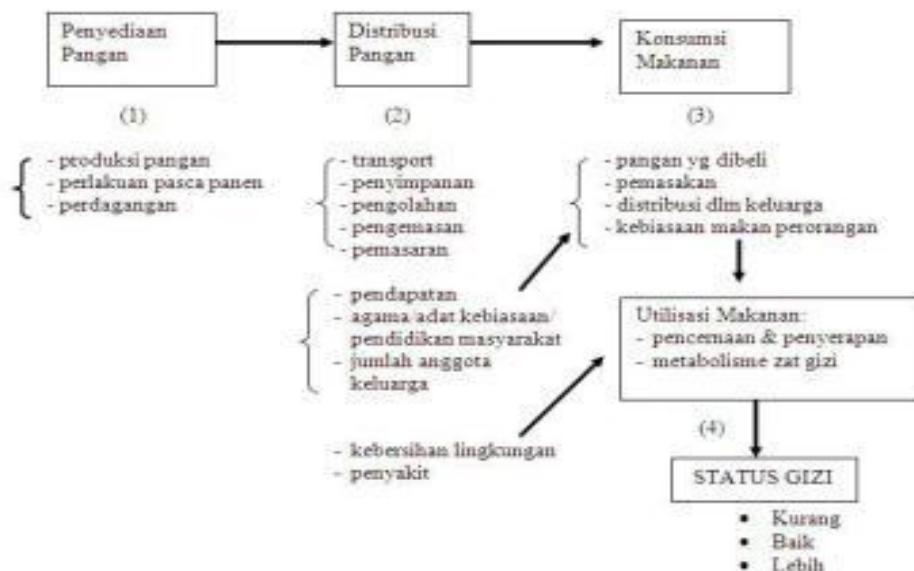
Sistem Pangan Gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi

1. Sistem Pangan dan Gizi

Sistem merupakan rangkain komponen atau unsur yang saling terkait menuju suatu tujuan yang sama. Sistem pangan dan gizi adalah suatu rangkaian input, proses, dan output sejak pangan masih dalam tahap produksi (berupa bahan produk primer maupun olahan) sampai dengan tahap akhir, yaitu pemanfaatannya dalam tubuh manusia yang diwujudkan oleh status gizi. Sistem pangan dan gizi mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi masyarakat dalam keadaan optimal.

Kepentingan dan manfaat dari sistem pangan dan gizi bagi kepala daerah adalah sebagai dasar menetapkan kebijakan penanggulangan masalah pangan dan gizi dalam menentukan daerah prioritas, merumuskan tindakan pencegahan terhadap ancaman krisis pangan dan gizi, mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, serta mengkoordinasikan program lintas sektor. Sedangkan untuk pengelola program, sistem pangan dan gizi bermanfaat sebagai dasar untuk menetapkan lokasi dan sasaran, menyusun kegiatan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sektor, proses pemantauan pelaksanaan, melaksanakan kerjasama lintas sektor dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Ada 4 komponen dalam sistem pangan dan gizi yaitu penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi makanan dan utilisasi makanan.



Gambar 1. Komponen sistem pangan dan gizi

a. Subsistem Produksi/Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun tertentu. Ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang berjenjang mulai dari nasional, provinsi (regional), lokal (kabupaten/kota), dan rumah tangga.

Komponen ketersediaan pangan meliputi kemampuan produksi, cadangan maupun impor pangan setelah dikoreksi dengan ekspor dan berbagai penggunaan seperti untuk bibit dan pakan industri makanan/nonpangan. Komponen produksi pangan dapat dipenuhi dari produksi pertanian dan atau industri pangan. Sebagai negara agraris yang besar, Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan nasional, meliputi:

- Teknologi lokal spesifik dan ramah lingkungan dapat dikembangkan untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam (lahan, air, perairan, sumber hayati)
- Teknologi agribisnis yang menganut konsep produksi bersih (clean production) sehingga limbah dapat diminimalisasi dengan cara memanfaatkan limbah dari suatu usaha sebagai input bagi usaha terkait, untuk memaksimalkan diversifikasi usaha dibidang pangan. Pemanfaatan limbah pertanian misalnya dapat dilakukan untuk memproduksi pupuk kompos, bahan pakan, dan bahan bakar.

1) Tingkat produksi

Tingkat produksi pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu cara bertani yang lebih produktif, mutu dan luas lahan, pola penguasaan lahan, pola pertanaman, tempat tinggal, perangsang berproduksi, peranan sosial, dan tingkat pendapatan.

2) Dinamika industri

Petani yang berorientasi pada pasar akan terpengaruh oleh dinamika industri. Petani akan meningkatkan suatu produksi pangan yang sedang banyak dibutuhkan oleh industri, seperti tomat sebagai bahan dasar pembuatan saos tomat, kentang sebagai bahan dasar pembuatan makanan ringan seperti potato chips, dan lain sebagainya. disisi lain, berkembangnya industri memberi dampak pada berkurangnya lahan produktif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi pangan perlu didukung program intensifikasi maupun pembukaan lahan pertanian.

3) Penanganan pasca panen

Dalam usaha tani kecil yang hanya untuk mencukupi pangan sendiri (subsistence farming) masalah teknologi pascapanen tidak terlalu penting karena bahan makanan yang dipanen langsung dikonsumsi sendiri. Akan tetapi, pada masa kini, biasanya produksi pangan terlebih dahulu melewati proses penanganan pasca panen. Banyak faktor yang mempengaruhi jalur pasca panen, antara lain a) mutu produk yang terkait dengan kondisi pascapanen, b) timbulnya penyusutan dan kerusakan selama penyimpanan dan perjalanan dari produsen ke konsumen. Kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap mutu dan nilai gizi pangan.

4) Ekspor-impor

Peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor. Ekspor-impor merangsang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perorangan, terutama petani, ekspor dapat dilakukan pada saat harga diluar negeri tinggi dan persediaan pangan dalam negeri mencukupi.

b. Sistem Distribusi dan Pemasaran

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Secara aktual, terdapat berbagai permasalahan penting dalam mengembangkan distribusi pangan.

Prasarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai sehingga terdapat wilayah-wilayah yang mengalami masalah pasokan pangan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini tidak hanya menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara fisik, tetapi juga secara ekonomis karena kelangkaan pasokan akan memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat.

Pemasaran pangan biasanya melalui rantai perdagangan yang panjang. Dari petani, pangan berturut-turut bergerak kepedagang pengumpul di desa, pedagang menengah di kecamatan, pedagang besar di kota, pengecer, penjaja sampai ke konsumen. Masing-masing pelaku pada rantai perdagangan tersebut mengambil keuntungan serta memperhitungkan penyusutan, jasa pengangkutan, jasa penyimpanan, dan jasa pelayanan sehingga perbedaan harga penjualan oleh produsen dan harga pembelian oleh konsumen sangat besar.

c. Subsistem Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, ekspresi setiap individu dalam memilih makanan akan berbeda satu dengan yang lain. Ekspresi tersebut akan membentuk pola perilaku makanan yang disebut kebiasaan makan.

Jumlah jenis pangan dan jenis serta banyaknya bahan pangan dalam pola makanan disuatu negara atau daerah tertentu, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam ditempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Disamping itu, kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga juga berpengaruh terhadap pola makan.

Pangan pokok yang digunakan dalam suatu negara biasanya menempati kedudukan tinggi. Penggunaan pangan tersebut lebih luas dari semua pangan yang lainnya, besar kemungkinannya berkembang karena dihasilkan dari tanaman asal setempat atau setelah dibawa ketempat tersebut tumbuh dengan cepat, kecuali itu, tanaman tersebut menghasilkan pangan dalam jumlah besar selama musim tanam yang panjang atau yang dapat disimpan dengan mudah untuk jangka waktu yang lama.

d. Subsistem Gizi

Subsistem gizi merupakan resultante dari subsistem sebelumnya, subsistem ini dicerminkan oleh status gizi yang berkaitan dengan penyerapan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Dalam hal ini, pangan akan mengalami berbagai tahapan, yaitu pencernaan yang terjadi dari mulut sampai usus, penyerapan (proses zat gizi masuk kedalam darah dan diangkut kesel-sel), pemecahan dan sintesis dalam sel dan pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan.

Mulai proses pencernaan dalam tubuh, makanan dipecah menjadi zat gizi, kemudian diserap kedalam aliran darah yang mengangkutnya ke berbagai bagian tubuh. Zat gizi yang tidak diperlukan setelah diserap segera disimpan dalam tubuh untuk penggunaan dikemudian hari.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan proses penggunaan zat gizi oleh tubuh.

1. Kelebihan makan melampaui kebutuhan tubuh akan menyebabkan kegemukan.

2. Kekurangan energi didalam makanan akan menyebabkan protein makanan (jika perlu juga protein jaringan) dipergunakan sebagai sumber tenaga. Ini sangat merugikan karena pangan sumber protein sangat mahal dan pengurangan jaringan protein akan melemahkan tubuh.

Semua zat gizi sangat penting dalam proses pemecahan dan sintesis zat gizi. Jika makanan tersusun secara seimbang maka akan dihasilkan kesehatan yang sempurna.

2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi yang dilihat setiap bulan dan tahun, serta penyebaran informasi. Data setiap bulan dan tahun tersebut menginformasikan tentang tiga aspek utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kerawanan pangan dan gizi yang terjadi di lapangan/daerah, serta untuk menentukan intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam melaksanakan SKPG, seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya.

Tujuan SKPG adalah untuk menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengelola program yang terkait dengan upaya meningkatkan perbaikan konsumsi makanan dan status gizi penduduk .

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yaitu:

- Indikator Output → tersedianya analisis situasi pangan dan gizi
- Indikator Outcome → terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan

- Indikator Impact → teratasinya kerawanan pangan di wilayah yang telah dilakukan intervensi penanganan kerawanan pangan

Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) SKPG

- a. Pokja pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang berada di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku Sekretaris DKP.

Anggota Pokja : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Sosial, BULOG, dan instansi lainnya yang terkait.

- b. Pokja provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi, yang berada di bawah koordinasi Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan selaku Sekretaris DKP Provinsi.

Anggota Pokja : perwakilan instansi Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris atau Asisten dari unsur Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Statistik, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Keluarga Berencana (SKPD KB), Dinas Sosial, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Divisi Regional Perum Bulog, dan Kepolisian Daerah.

- c. Pokja Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Ketua DKP Kabupaten/Kota, yang berada di bawah koordinasi Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan selaku Sekretaris DKP Kabupaten/Kota.

Anggota Pokja : perwakilan Badan/Kantor/ Dinas/ unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, Bappeda, Sekretaris Daerah atau Asisten dari unsur Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Statistik

Kabupaten/Kota, SKPD-KB Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Divisi Regional Perum Bulog, dan Kepolisian Resort.

Peran dan tugas Pokja SKPG dalam pengelolaan SKPG baik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan koordinasi teknis serta konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler setiap bulan dan akhir tahun
- Menemukanali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
- Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi bulanan maupun tahunan untuk aspek: ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan, serta data spesifik lokal lainnya
- Melakukan analisis hasil SKPG untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu wilayah. Hasil analisis SKPG yang menunjukkan rawan, mengindikasikan bahwa beberapa rumah tangga di wilayah tersebut tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya dalam waktu yang cukup lama, atau di wilayah tersebut mengalami kondisi rawan pangan kronis. Hasil analisis SKPG ditunjukkan dengan warna merah (rawan), kuning (waspada), dan hijau (aman)
- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi setiap tiga bulan (triwulan) dan tahunan
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi, serta menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi
- Melaporkan hasil analisis bulanan dan tahunan kepada Ketua DKP secara berjenjang melalui Sekretaris DKP baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan : informasi yang mengemuka, hasil analisis bulanan, dan merumuskan langkah-langkah intervensi.
-

Komponen sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) di Indonesia meliputi:

1. Analisis Data SKPG

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Untuk analisis data SKPG tahunan, data yang dianalisis adalah

- a. ketersediaan pangan dengan menghitung rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normative
- b. akses pangan yaitu dengan menghitung persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, serta diperkuat dengan analisis terhadap harga komoditas pangan utama dan strategis, IPM, dan NTP
- c. pemanfaatan pangan dengan menilai prevalensi gizi kurang pada balita.

Dalam analisis data tahunan diperlukan data SKPG bulanan dan tahunan pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Data yang diperlukan :

- a. Data luas tanam, luas puso, dan luas panen dari BPS/Dinas Pertanian
- b. Data harga komoditas pangan utama dan strategis dari BPS/Dinas Perindag
- c. Data status gizi balita dari Dinas Kesehatan
- d. Data cadangan pangan dari Bulog
- e. Data keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I dari BKKBN
- f. Data lainnya yang mendukung analisis situasi pangan dan gizi dari Dinas Sosial dan BPNB

Indikator Analisis SKPG Bulanan

a. Ketersediaan Pangan

Indikator yang digunakan pada aspek ketersediaan adalah luas tanam dan luas puso dari empat komoditas, yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Berdasarkan analisis, akan diperoleh persentase luas tanam dan luas puso pada bulan berjalan/bulan analisis dibanding dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan lima tahun terakhir. Nilai persentase yang dihasilkan akan menunjukkan tingkat rawan pangan wilayah tersebut.

Tabel 1. Persentase Peningkatan/Penurunan Luas Tanam dan Luas Puso

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan
2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rawan

b. Akses Pangan

Aspek akses pada analisis SKPG bulanan menggunakan indikator fluktuasi delapan komoditas harga pangan. Hasil analisis akan menghasilkan persentase rata-rata harga bulan berjalan delapan komoditas dibandingkan dengan rata-rata harga tiga bulan sebelumnya. Berdasarkan nilai persentase yang dihasilkan akan menunjukkan tingkat rawan pangan wilayah tersebut.

Tabel 2. Presentase Peningkatan/Penurunan Harga Delapan Komoditas

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

	3 bulan terakhir		
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
5	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas gula dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
6	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas minyak goreng dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
8	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga yaitu aspek pemanfaatan, menggunakan indikator kesehatan balita. Ada tiga indikator yang digunakan untuk analisis SKPG bulanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Status Gizi Balita

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang (D)	$r > 90$	1 = Aman
		$80 \leq r \leq 90$	2 = Waspada
		< 80	3 = Rawan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rawan
3	Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rawan

Indikator analisis SKPG tahunan

a. Aspek ketersediaan

Situasi pangan dan gizi pada aspek ketersediaan pangan tahunan diketahui berdasarkan angka rasio ketersediaan pangan. Ini diperoleh dengan menghitung ketersediaan pangan sereal per kapita per hari dibanding nilai konsumsi normatif (300 gram).

- Nilai konsumsi normatif didasarkan pada pola konsumsi pangan di Indonesia yang menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan

Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Tabel 5. Nilai Rasio Ketersediaan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 \leq r \leq 1,14$	2	Kuning
	$r < 0,90$	3	Merah

b. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir.

Tabel 6. Nilai Persentase KK Pra-KS dan KS-1

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
% Pra Sejahtera dan Sejahtera I	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 7. Nilai Persentase Prevalensi Gizi Kurang Balita

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada Balita	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

2. Penyebaran informasi

Dalam upaya melakukan penyebaran informasi mengenai situasi pangan dan gizi di beberapa daerah serta penyediaan data-data pendukung dalam kegiatan SKPG di Propinsi/Kabupaten/Kota, maka Badan Ketahanan Pangan secara resmi mempublikasikan kegiatan SKPG seperti :

- (1) data-data pendukung SKPG
- (2) dokumen-dokumen pendukung SKPG
- (3) rekapitulasi pengiriman laporan SKPG oleh propinsi/kabupaten/kota
- (4) analisis hasil SKPG yang merupakan informasi situasi pangan dan gizi di beberapa propinsi dan kabupaten/kota.

Diharapkan dengan adanya informasi yang ditampilkan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pelaksana kegiatan SKPG di Propinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat umum yang akan memanfaatkan informasi mengenai situasi pangan dan gizi.

Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis SKPG. Investigasi dilakukan untuk mengetahui:

- a. akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain
- b. tipe bantuan/intervensi yang diperlukan
- c. sasaran penerima manfaat
- d. besaran bantuan
- e. waktu pelaksanaan intervensi
- f. letak lokasi sasaran
- g. mekanisme intervensi
- h. upaya penanganan melalui bantuan pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.

Investigasi dilaksanakan maksimal lima hari setelah menerima informasi adanya gejala rawan pangan untuk memperkirakan kondisi terkait dengan produksi, distribusi bahan pangan dan kesehatan.

Intervensi

Intervensi yang digunakan berdasarkan hasil investigasi agar mampu menanggulangi kerawanan pangan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan perlu menetapkan beberapa hal :

- a. sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga)
- b. tipe bantuan/intervensi yang diperlukan
- c. besar bantuan
- d. waktu intervensi, mekanisme, durasi dan skala intervensi

Berdasarkan waktu dan jenis bantuan, intervensi dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Intervensi Jangka Pendek

Intervensi dilakukan untuk penanganan rawan pangan resiko rendah dan sedang. Apabila dalam waktu 3 bulan belum dapat diatasi, dapat melakukan intervensi jangka menengah. Jenis intervensi :

- a. Intervensi jangka pendek hasil pengamatan dan prakiraan kemungkinan kejadian kerawanan pangan disuatu wilayah atau masyarakat melalui SKPG
- b. Intervensi jangka pendek untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang menimbulkan rawan pangan transien atau kronis.

2. Intervensi Jangka Menengah

Intervensi dilakukan untuk menangani rawan pangan resiko tinggi. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perlu monitoring dan evaluasi. Apabila permasalahan belum selesai

3. Intervensi Jangka Panjang

Intervensi diarahkan untuk penanggulangan rawan pangan kronis melalui pemberian bantuan kegiatan dalam waktu di atas satu tahun. Jenis intervensi :

a. Intervensi Pangan

Jika terjadi penurunan indikator ketersediaan pangan. Intervensi berupa pemberian bantuan pangan termasuk pangan siap saji atau makanan tambahan untuk balita. Jangka waktu intervensi ini 3 bulan.

b. Intervensi Non Pangan

Jika terjadi perubahan terhadap indikator produksi pertanian dan distribusi bahan pangan. Intervensi berupa bantuan sarana produksi pertanian, operasi pasar, atau sarana distribusi bahan pangan.

Penanganan rawan pangan kronis jangka panjang melalui bantuan program/kegiatan dapat dikembangkan oleh instansi misalnya kegiatan Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan), Pengembangan Lumbung Pangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Desa Siaga, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Program Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani), Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga (Smallholder Livelihood Development Programme in Eastern Indonesia/ SOLID), atau program pemberdayaan lainnya.